

## Bupati Tangerang Larang Perayaan Tahun Baru

**TANGERANG (IM)** - Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar menegaskan, pihaknya melarang diadakannya perayaan Tahun Baru 2021 bagi warga Kabupaten Tangerang.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini masih terus merajalela.

"Kita sudah memutuskan menerbitkan surat pelarangan dan imbauan tidak merayakan hari tahun baru di tahun 2020 ini," ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/12).

Zaki meminta masyarakat untuk terus waspada terhadap penyebaran Covid-19, salah satunya dengan tidak mengadakan pesta perayaan akhir tahun.

Pasalnya, aktivitas tersebut cenderung menciptakan kerumunan dan berpotensi terjadi penularan Covid-19. "Tidak ada (perayaan euforia). Dilarang semuanya," serunya.

Sementara itu, untuk perayaan natal, Zaki mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk merayakan di rumah masing-masing sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Tentu saja perayaan natal sesuai dengan protokol kesehatan dan instruksi dari pemerintah pusat untuk dibatasi dan kita imbau juga untuk pelaksanaannya di rumah masing-masing melalui daring ataupun media telekomunikasi yang lain," ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan, pihaknya melarang seluruh kegiatan yang menimbulkan keramaian, termasuk pesta perayaan Tahun Baru 2021 mendatang.

"Kita sudah lama mengeluarkan surat edaran terkait dengan larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun, sekitar dua bulan yang lalu.

Jadi secara keseluruhan kita larang, termasuk perayaan malam tahun baru," kata Hendra.

Dia menyampaikan telah menginstruksikan kepada pihak kecamatan untuk menindaklanjuti larangan tersebut ke tingkat RT dan RW.

Jika instruksi dilanggar, kata Hendra, Satpol PP atau pihak kepolisian akan menindak tegas. ● pp



**SIDAK HARGA SEMBAKO JELANG NATARU**

Kepala Disperindag Provinsi Banten Babay Suharso (kanan) didampingi Kadis Perindag Kota Serang Ahmad Zubaidillah (kedua kanan) berdialog dengan pedagang telur saat Sidak Harga Sembako di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (16/12). Sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

## Apdesi Banten Siap Berperan Jadi Mediator Rakyat dan Pengembang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang selalu kooperatif setiap memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tak terkecuali, adanya timbul permasalahan seperti terjadi saat ini.

**SERANG (IM)** - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) siap menjadi jembatan aspirasi persoalan tanah masyarakat yang terindikasi overlapping atau tumpang tindih.

Demikian disampaikan

Ketua Apdesi Provinsi Banten, Surta Wijaya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/12)

Menyorot hiruk pikuk urusan tanah yang ada di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang, Surta yang

juga Kepala Desa Babakan Asem Teluknaga Kabupaten Tangerang ini menegaskan akan menjadi fasilitator antara masyarakat dengan pengembang.

"Saya atas nama asosiasi (Apdesi-red) siap membantu menyelesaikan overlapping tanah antara masyarakat yang mengklaim dan pengembang. Baik upaya jalur hukum atau musyawarah," ujar Surta.

Menurut Surta, upaya musyawarah tengah dilakukan oleh pihaknya, di mana men-

empatkan persoalan dengan objektif dan proposanal.

Dibeberkan, seperti Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) yang bermasalah pun tengah diselesaikan dan sudah beberapa ada yang rampung.

"Harus objektif, satu sisi dampak positif pembangunan yang sudah berjalan dari investor sangat banyak untuk masyarakat kelak.

Saya pegang prinsip, suatu persoalan dapat diselesaikan dengan baik, jika dengan cara yang baik juga," terangnya.

Surta menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang selalu kooperatif setiap memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.

Tak terkecuali, adanya timbul permasalahan seperti terjadi saat ini.

"Pro aktif kok pihak BPN nya, saya yang mengalami.

Pelayanan administratif baik dan ada permasalahan langsung respon cepat untuk menyelesaikan," tuturnya. ● pp

## Buruh Tangerang Tolak UMK Gubernur Banten

**TANGERANG (IM)** - Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor industri. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun marak di Kota Tangerang. Sementara buruh masih meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum kota (UMK).

Koordinator Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak, Maman Nuriman dalam aksi unjuk rasa di Puspermkot Tangerang pada Rabu (16/12), mengatakan, pihaknya menolak keputusan Gubernur Banten yang menaikkan UMK untuk 2021 hanya 1,5 persen.

"Aksi kali ini menuntut Pemprov Banten agar segera merevisi keputusan UMK 2021. Kami menuntut UMK ini naik sebesar rekomendasi dewan pengupahan provinsi, yakni 3,33 persen," ujarnya.

Maman menyebut para buruh di Kota Tangerang juga akan melakukan konsolidasi

besar-besar untuk menuntut Gubernur Banten mengubah keputusannya tentang UMK 2021 tersebut.

"Bersepakatan bahwa revisi ini belum terlambat. Artinya revisi bisa dilakukan kalau ada gerakan masif," jelasnya.

Maman juga menyampaikan tanggapannya kalau di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada gelombang PHK ini, tetapi buruh masih meminta UMK 2021 naik.

Menurutnya, saat ini terutama mulai Juli 2020, perusahaan industri tidak berdampak pada pandemi Covid-19. Sebab, produksi masih tetap berjalan.

"Kalau menurut saya ini tidak ada kaitan dengan pandemi Covid-19. Ini hanya sebatas alasan-alasan pengusaha untuk melakukan libur tidak dibayar, PHK missal, sementara produksi itu berjalan normal," pungkasnya. ● pp

## Pemkot Tangsel Juga Kaji Larangan Perayaan Tahun Baru

**TANGSEL (IM)** - Pemerintah Kota Tangerang Selatan tengah mempertimbangkan terkait peraturan pelarangan mengadakan pesta perayaan Tahun Baru 2021 bagi pemilik usaha pariwisata di wilayah Tangerang Selatan. Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan, pihaknya sedang mengkaji terkait pelarangan tersebut.

"Masih kita kaji. Hari Kamis (17/12) ini kita akan rapat dengan Forkopimda, nanti hasilnya seperti apa akan dibahas," kata Airin belum lama ini.

Airin mengatakan ada kemungkinan aturan larangan itu dikeluarkan olehnya, seperti halnya yang dilakukan di Jakarta. Diketahui, pemilik usaha pariwisata di Jakarta dilarang menggelar perayaan malam tahun baru melalui Surat Edaran Disparekrif DKI Jakarta yang ditandatangani pada 7 Desember 2020. "Bisa jadi. Kalau misalkan terus bertambah (kasus Covid-19), terus rumah sakit kita belum siap, ya bisa jadi kita larang," kata dia.

Namun, Airin berharap kepada para pemilik usaha

pariwisata di Tangerang Selatan untuk tidak mengadakan pesta perayaan Tahun Baru

2021, meskipun hingga saat ini belum ada kejelasan soal ada atau tidaknya larangan tersebut. "Kita berharap kan enggak ada ya (perayaan Tahun Baru). Ngapain dengan kondisi Covid-19, tapi kalau ada event tentu ikuti protokol kesehatan. Kan sudah ada protap mekanismenya," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menegaskan adanya pelarangan kegiatan yang menimbulkan keramaian, termasuk pesta perayaan Tahun Baru 2021 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi.

"Kita sudah lama mengeluarkan surat edaran terkait dengan larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun, sekitar dua bulan yang lalu. Jadi secara keseluruhan kita larang, termasuk perayaan malam tahun baru," ujar Hendra. ● pp

## SOAL GANTI RUGI LAHAN Pemkot Tangerang Sampaikan Tuntutan Warga ke Jokowi

**TANGERANG (IM)** - Pemerintah Kota Tangerang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait masalah pembayaran lahan warga untuk pembangunan Jalan Tol Bandara ruas Cengkareng - Batuaceper - Kunciran atau JORR II.

"Kemarin siang sudah disampaikan melalui Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kemensetneg untuk disampaikan ke Presiden (Jokowi)," kata Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarnan di Tangerang, Rabu (16/12).

Perlu diketahui sejumlah warga Kelurahan Jurumudi, Benda sejak Senin, 14 Desember 2020 menggelar aksi di area Pusat Pemerintahan Kota Tangerang sebagai wujud kekecewaan atas ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalan Tol Bandara ruas Cengkareng - Batuaceper - Kunciran atau JORR II.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul mengatakan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR harus bergerak cepat merespon aksi warga Jurumudi mengingat Pemkot Tangerang tidak me-

miliki kewenangan untuk menentukan harga pasar atas lahan tempat tinggal mereka karena dilakukan oleh tim appraisal.

"Sejatinya Pemkot Tangerang tak memiliki kewenangan untuk mengabdikan keinginan warga.

Sebab semua diputuskan oleh tim appraisal.

Kini tim appraisal harus melakukan proses penghitungan ulang agar harapan warga ini bisa diakomodir," katanya.

Adib menilai jika aksi yang dilakukan oleh warga tersebut sebagai bentuk harapan warga kepada Pemerintah Daerah untuk membantu menyelesaikan masalah yang tak kunjung menemui titik terang.

"Namun harus dipahami warga, keputusan akhir berada di Pemerintah Pusat, bukan di Pemda. Karena Pemda hanya sebagai fasilitator," katanya.

Selain itu Adib juga mendorong agar Kementerian PUPR mampu bertindak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperhatikan berbagai aspek, tentunya agar aset yang dimiliki warga hilang begitu saja atau nilai yang diterima tak sesuai harapan.

"Warga memiliki aset tersebut untuk hidup, jangan sampai hilang.

Jadi harus diperhatikan lagi sesuai dengan kebutuhan ke depannya dan tak kehilangan tempat tinggal," tegasnya.

Sebagai informasi pada tanggal 2 September 2020 telah dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan lahan sesuai surat ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang per 8 Mei 2020 nomor 21/PEN.EKS.2020/PN.TNG Jo. Nomor. 161/PDT.P.CON.S./2019/PN.TNG.

Hingga hari kedua aksi warga tetap memaksa untuk dapat bertemu dengan Wali Kota Arief S Wisnansyah hingga memasuki kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang walaupun telah ditemui oleh Kasatpol PP Kota Tangerang serta Bagian Hukum Pemkot Tangerang yang menjelaskan duduk perkara tapi justru ditolak oleh warga.

Adapun lahan yang dikosongkan tersebut untuk pembangunan jalan bebas hambatan, perkotaan dan fasilitas Jalan Daerah satuan kerja pengadaan tanah jalan tol Cengkareng-Batuaceper-Kunciran dan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). ● pp



**OLAHRAGA PASIEN COVID-19 DI BEKASI**

Petugas medis (tengah) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bersama pasien COVID-19 yang berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala) saat kegiatan senam pagi di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/12). Kegiatan senam tersebut rutin dilakukan setiap pagi hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien yang menjalani isolasi.

## CEGAH PENULARAN COVID-19

### Lebak Optimalkan Pengawasan dari Tingkat Kecamatan

**LEBAK (IM)** - Petugas pengawasan Covid-19 kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengoptimalkan protokol kesehatan untuk mengendalikan pencegahan Covid-19.

"Kami mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan cukup tinggi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak, Norriyatna, di Lebak, Selasa malam.

Petugas pengawasan Covid-19 di sini bekerja selama 24 jam untuk mengoptimalkan edukasi tentang bahaya penularan Covid-19 atau Virus Corona dengan mendatangi permukiman masyarakat.

Selain itu, juga membagikan masker, menyemprotkan disinfektan, menyediakan wastafel untuk mencuci tangan, juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Di samping itu, petugas pengawasan Covid-19 juga melaksanakan operasi masker bagi pengendara roda dua dan roda empat di sejumlah titik.

Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker, maka dikenakan sanksi kerja sosial agar mereka merasa malu.

"Dengan kerja keras itu hingga kini warga tidak dite-

mukan Covid-19," katanya menjelaskan.

Menurut dia, masyarakat Cikurur yang tersebar di 12 desa hingga kini kesadaran menerapkan protokol kesehatan sekitar 85 persen dari 6.500 jiwa.

Pihaknya hingga kini terus mensosialisasikan protokol kesehatan dengan melakukan pemasangan banner dan spanduk di sudut-sudut pemukiman untuk mengingatkan kepada masyarakat agar selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Kami menargetkan protokol kesehatan bisa menjadi budaya masyarakat untuk memutus mata rantai Covid-19," katanya.

Sekretaris Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Berlan mengajak warganya agar menerapkan disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dalam melaksanakan kegiatan.

Selain itu, petugas pengawasan Covid-19 kecamatan setiap hari mendatangi tokoh agama maupun tokoh masyarakat agar mendukung protokol kesehatan guna mencegah penyebaran wabah.

"Kami tidak segan-segan untuk menegur jika ditemukan warga yang melanggar protokol kesehatan dengan 3M," katanya pula. ● pra



**KUNJUNGAN WISATA KE SITUS BUNG KARNO DI ENDE**

Sejumlah wisatawan berwisata di rumah pengasingan Presiden Pertama Indonesia Soekarno di Kota Ende, NTT Rabu (16/12). Minat wisatawan yang berkunjung ke situs rumah pengasingan bung Karno itu mengalami penurunan semenjak kasus Covid-19 di daerah itu terus meningkat.

## Cegah Kerumunan, Polda Banten Filter Massa yang Hendak Ikut Demo

**SERANG (IM)** - Personel Polda Banten melakukan kegiatan filterisasi massa yang hendak melakukan aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi terkait penegakan hukum oleh Polri terhadap kasus dugaan penghasutan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Rizieq Syihab (MRS).

Kegiatan filterisasi tersebut dilakukan guna mencegah kerumunan, karena mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih tinggi hingga saat ini.

Kegiatan filterisasi tersebut dipimpin oleh Direktur Reskrim Polda Banten, Kombes Pol Martri Sonny, dan dihadiri Direktur Binmas Polda Banten, Kombes Pol Riki Yanuarfi, Kabid Propam Polda Banten, Kombes Pol Yohan Prioto dan Karorena Polda Banten, Kombes Pol Jumiran.

Direktur Reskrim Polda Banten, Kombes Pol Martri Sonny mengatakan, kegiatan filterisasi bertujuan untuk mencegah oknum-oknum ormas yang rencana datang ke Polda Banten untuk melakukan aksi menyampaikan aspirasi.

"Personel Polda Banten memerintahkan oknum ormas

yang hendak ikut aksi untuk putar balik kendaraannya. Negara kita adalah negara hukum. Apabila terjadi perbedaan pendapat, silakan menempuh mekanisme hukum, lebih baik para simpatisan pengunjuk rasa menempuh mekanisme hukum tanpa harus berkerumun," tegas Martri Sonny, di Serang, Rabu (16/12).

Selanjutnya Martri Sonny mengimbau kepada oknum-oknum ormas agar pulang ke rumahnya masing-masing.

"Dan tadi kita imbau kepada mereka agar pulang ke rumahnya masing-masing. Kita ingatkan ke mereka bahwa berkerumun di masa pandemi Covid-19 sangat berbahaya, bisa tertular," ujarnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi mengajak seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

"Di masa pandemi Covid-19, mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan.

Jangan berkerumun, apalagi kita dari kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk melakukan aksi unjuk rasa," ujar Edy Sumardi. ● pra